

## **PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DIMODERASI INTERNAL DAN EKSTERNAL CONTROL PADA SKPD DI KABUPATEN GOWA**

**Muhammad Fadhil Arrijal**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: Arrijal99@gmail.com

### **Keywords:**

Budget,  
Performance,  
Local  
Government,  
Moderation,  
internal, external,  
control

### **Abstract**

*This sample was taken from the SKPD in the Gowa Regent's office. The type of data used in this study is quantitative data with a causative approach which is causal in nature and obtained from questionnaires distributed and related to the problem under study. Data collection was carried out by distributing questionnaires. In this study, the data sources used in data collection include primary data. Based on the results of data research using statistical calculations through the application of the Statistical package for the social science (SPSS) version 29 regarding the effect of performance-based budgeting on local government performance moderated internal and external control Variable X1 (Performance-based budgeting) gives a significance value This means that H1 is accepted so that it can be said that performance-based budgeting has a positive and significant effect on local government performance. Internal control does not moderate the relationship between performance-based budgeting and local government performance. External control does not moderate the relationship between performance-based budgeting and local government performance. Good internal and external supervision will be able to improve local government performance produced by SKPD. In fact, the SKPD in Gowa Regency has not been maximized in terms of internal and external supervision and this has not been able to improve the performance of the local government. It is better to make continuous improvements so that the performance of local government can continue to increase..*

### **Kata Kunci**

Anggaran,  
Kinerja,  
Pemerintah  
Daerah,  
Moderasi,  
internal,  
Eksternal,  
control.

### **Abstrak (Bahasa Indonesia)**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan pendekatan kausatif yang bersifat sebab akibat dan diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer. Berdasarkan hasil penelitian data dengan menggunakan perhitungan statistic melalui aplikasi Statistical package for the social science (SPSS) versi 29 mengenai pengaruh

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dimoderasi internal dan eksternal control Variabel X1 (Anggaran berbasis Kinerja) memberikan nilai signifikansi Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pemerintah daerah. Control internal tidak memoderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Control eksternal tidak memoderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal dan eksternal yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD. Dalam kenyataannya SKPD Kabupaten Gowa belum maksimal dalam pengawasan internal maupun eksternal dan hal ini belum mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sebaiknya melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja pemerintah daerah dapat terus meningkat

---

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kekuasaan, wewenang dan tugas daerah otonom, dalam penyelenggaraan wilayahnya masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi yang penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah. Aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan pihak luar eksekutif yaitu (masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan (Halidayanti, 2014).

Organisasi sektor publik wajib dilakukan oleh pemerintah daerah agar memiliki kinerja berorientasi dan mendorong pemerintah untuk selalu memenuhi tanggung jawab akan lingkungannya dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan transparan (Wulandari, 2013). Dalam organisasi sektor publik, pengawasan keuangan negara bertujuan untuk melihat apa sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika ternyata kemudian ditemukan penyimpangan atau hambatan diharapkan dapat segera diambil tindakan koreksi berasumsi bahwa pelaksanaan tindakan ini. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dapat terus sepenuhnya mencapai tujuannya (Halidayanti, 2014). Pengawasan eksternal merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif yang berfungsi diantaranya diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana secara langsung oleh masyarakat (Saputra, 2014). Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dengan membangun suatu sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan (Halidayanti, 2014).

Adapun fenomena yang terjadi, Juru bicara anggaran DPRD Kabupaten Gowa, dari hasil pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa rincian APBD Kabupaten Gowa tahun 2021 sebagai berikut, pendapatan daerah Rp.1.841.411.192.535, belanja daerah Rp.2.144.411.192.535 pembiayaan daerah terdiri penerimaan Rp.353.000.000.000 pengeluaran Rp.50.000.000.000 Surplus Rp.303.000.000.000 sisa lebih pembiayaan tahun berkenan Rp.0 , selain itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi TAPD dan seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Gowa yang telah bersedia memberikan penjelasan pada pembahasan RAPBD Kabupaten

Gowa tahun anggaran 2021 selama beberapa hari ini . Beberapa program yang masih belum di jalan kan seperti visi dan misi Bupati Gowa yang di tuangkan di dalam RPJMD, dan juga beberapa objek wisata akibat kurang matangnya perencanaan suatu kegiatan, kurangnya pengawasan serta pengendalian dana yang di salurkan ke masyarakat dan terdapatnya SKPD yang membelanjakan anggaran belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dapat di simpulkan SKPD Kabupaten Gowa belum tercapai maksimal (Benuasulsel, 1 Desember 2021). Hasil penelitian (Halidayanti & Saputra, 2014) tentang pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, pengawasan eksternal (Halidayanti, 2014) menemukan bahwa pengawasan eksternal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan (Saputra, 2014) menemukan bahwa pengawasan eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel bebasnya adalah anggaran berbasis kinerja sedangkan variabel terikatnya kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan variabel moderasi yaitu control eksternal dan control internal

Berdasarkan Latar belakang ini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh penerapan eksternal dan internal terhadap pengawasan kinerja pemerintah daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kabupaten gowa ,yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dengan moderasi internal dan eksternal control. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2023

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah daerah dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Menurut Deifi (2013) mengatakan bahwa mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja adalah anggaran berbasis kinerja yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan apabila pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, output dan feedback maka akan menghasilkan output/outcome serta kinerja yang baik. Berarti jika pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan baik maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat .

### **3.2. Control internal moderasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara control internal moderasi anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah daerah dilihat berdasarkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa anggaran berbasis kinerja diawali dengan pencapaian tujuan, program dan disadari oleh pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik disisi eksekutif maupun legislative. Oleh sebab itu anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja dan kualitas yang baik apabila adanya pengaruh pengawasan internal yang dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah. Semakin baik pengawasan internal yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai. Tetapi pada SKPD Kabupaten Gowa pengawasan internal terbukti tidak mempengaruhi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh

SKPD. Dalam kenyataannya SKPD Kabupaten Gowa belum maksimal dalam pengawasan internal dan hal ini belum mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah

- 3.3. Control eksternal moderasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa control internal tidak moderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dilihat berdasarkan nilai signifikan lebih tinggi dari 0,05, Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2013) yang menyatakan bahwa control eksternal yang dilakukan masyarakat dan dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah atau dengan kata lain pengaruh control eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Control internal tidak memoderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah hal ini pengawasan internal yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD. Dalam kenyataannya SKPD Kabupaten Gowa belum maksimal dalam pengawasan internal dan hal ini belum mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Control eksternal tidak memoderasi hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah hal ini dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah atau dengan kata lain pengaruh control eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## REFERENSI

- Ary, I. R., Agung, A., & Sriathi, A. (2019). PENGARUH SELF EFFICACY DAN LOCUS Of Control Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Ramayana Mal Bali). 8(1), 6990–7013. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.V8.I1.P2>
- Halidayanti, I. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh).
- Ichsan, H. (2019). Tesis Pengaruh Intellectual Capital Disclosure Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi Oleh Intergovernmental Revenue Dan Leverage The Effect Of Intellectual Capital Disclosure On Local Government Financial Performance Moderated By Intergovernmental Revenue And Leverage.
- Jurnery, M., & Hanisah, N. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur.
- Leonardo Wongkar, D., Senduk, V. A., & Tanor, L. A. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa. Jaim: Jurnal Akuntansi Manado, 2(1).

---

Sabrina, A. N. (2009). B200050016.

Saputra, M. W. (N.D.). Pengaruh Pengawasan Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

Suwandi, A. P. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasiterhadap Kinerja Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang).

U'ah Ganda Fratiwi. (N.D.). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur) U'ah Ganda Fratiwi 1.

Wulandari, N. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah .